



KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 01/KEP/KIDKI/XII/2021**

TENTANG

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
 - b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
 - 4. Pergub DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 22 November 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan.

KEDUA : Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari 15 (lima belas) kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan dan didapatkan tiga besar badan publik berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi ini.

KETIGA : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

KETUA



HARRY ARA HUTABARAT, SH., MH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI
 DKI JAKARTA
 NOMOR : 01/KEP/KIDKI/XII/2021
 TENTANG
 HASIL MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
 BADAN PUBLIK DI PROVINSI DKI JAKARTA
 TAHUN 2021

**HASIL TIGA BESAR BADAN PUBLIK MONITORNG DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021**

BADAN	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
3.	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

DINAS	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	DINAS KEBUDAYAAN
2.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
3.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIRO	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA
2.	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
3.	BIRO KERJA SAMA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA/ KABUPATEN ADMINISTRASI	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
2.	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
3.	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	RSUD PASAR MINGGU
2.	RSUD BUDHI ASIH
3.	RSKD DUREN SAWIT

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	PT MRT JAKARTA (PERSERODA)
2.	PT TRANSPORTASI JAKARTA
3.	PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

BADAN PERTANAHAN TINGKAT KOTA DAN KABUPATEN	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2.	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
3.	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSITRASI JAKARTA UTARA

KEJAKSAAN NEGERI	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
2.	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR
3.	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

KEPOLISIAN RESOR	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	POLRES METRO JAKSEL
2.	POLRES KEPULAUAN SERIBU
3.	POLRES JAKARTA PUSAT

LEMBAGA NON STRUKTURAL (LNS)	
No.	NAMA BADAN PUBLIK
1.	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
2.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
3.	DEWAN RISET DAERAH